



PENDAMPINGAN PELAPORAN KEUANGAN PADA PENGURUS BUMDES DI KABUPATEN PACITAN

Zef Arfiansyah¹⁾; Resi Ariyasa Qadri²⁾; Amrie Firmansyah³⁾

¹⁾zef.arfiansyah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾resi.ariyasa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

The community service (PKM) that we do aims to provide financial reporting assistance to BUMDes Management in Pacitan Regency, East Java Province. The method of implementing community service activities consists of the planning, implementation, and evaluation stages. The planning stage was carried out with coordination between the Polytechnic of State Finance STAN PKM Team and the Pacitan Regency Community and Village Empowerment Office related to implementing activities. In addition, the planning stage is carried out by visiting one of the village-owned business entities to identify problems. The second stage was carried out by presenting material by the Team to the management of the Pacitan Regency village-owned business entity on June 2, 2022. The third stage was monitoring and evaluating the participants' understanding of the material submitted both online and through visitation to 3 owned business entities villages on November 21-24, 2022. This PKM activity provides benefits for BUMDes management in increasing their ability in preparing financial reports so that can be used in BUMDes business development and tax obligations in the future.

Keywords: *accounting, village-owned enterprises, education, financial statements*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang Kami lakukan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pelaporan keuangan pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan dengan koordinasi antara Tim PKM Politeknik Keuangan Negara STAN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tahap perencanaan dilakukan dengan mengunjungi salah satu BUMDes untuk melakukan identifikasi masalah. Tahap kedua dilakukan dengan penyampaian materi oleh Tim kepada pengurus BUMDes Kabupaten Pacitan pada tanggal 2 Juni 2022. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi atas pemahaman peserta terkait dengan materi yang telah disampaikan baik yang dilakukan melalui daring maupun melalui visitasi kepada 3 BUMDes pada tanggal 21-24 November 2022. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi pengurus BUMDes dalam meningkatkan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pengembangan usaha dan kewajiban perpajakan BUMDes di masa mendatang.

Kata Kunci : akuntansi, BUMDes, edukasi, laporan keuangan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Agunggunanto et al., 2016). Kehadiran BUMDes dinilai sangat penting untuk membangun perekonomian di sebuah desa. Namun, implementasi dari peran BUMDes akan menjadi sulit ketika BUMDes tidak memiliki sumber daya dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, banyak sekali BUMDes yang sudah berdiri namun tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, seperti kompetensi pegawai dan kemampuan manajerial yang terbatas. Kondisi ini mengakibatkan unit usaha BUMDes belum berjalan secara optimal, atau pendirian BUMDes hanya menjadi euforia saja.

Salah satu yang penting disediakan BUMDes adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini sangat penting dalam menyajikan aktivitas perusahaan dalam satu periode terkait dengan keuangan BUMDes (Firmansyah, 2019). Selain itu, laporan keuangan juga berguna bagi BUMDes dalam pelaporan perpajakannya (Firmansyah, 2019). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK di tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 1034 BUMDes tidak menyampaikan laporan keuangan, 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan BUMDes serta sebanyak 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola



yang kompeten (CNN Indonesia, 2019). Terkait dengan permasalahan di atas, diperlukan adanya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui kegiatan pelatihan dan penguatan pelaporan keuangan dengan tujuan agar pengelola BUMDes memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Pengelola BUMDes perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan pelaporan keuangan yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik melalui pengelolaan dana dari masyarakat dan pemerintah secara tepat. Kondisi tersebut dapat mendorong seluruh kegiatan yang ada di BUMDes dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Salah satu kewajiban dari *civitas academia* dalam tridarma pendidikan adalah pengabdian kepada masyarakat (PKM) Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki pengalaman dalam pelaporan keuangan perlu berperan dalam pengembangan kapasitas BUMDes melalui pendampingan dan edukasi pengurus BUMDes dalam pelaporan keuangan. Beberapa *civitas academia* telah melakukan PKM dengan topik pelaporan keuangan BUMDES (Arista et al., 2021; Biduri et al., 2022; Fauzan et al., 2022; Fitriyah et al., 2022; Junaidi, 2020; Savitri et al., 2022). Dengan demikian, PKM dengan topik pendampingan pelaporan keuangan pada pengurus BUMDes relevan dapat dilakukan oleh *civitas academia* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Di tahun 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN memiliki nota kesepahaman dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Propinsi Jawa Timur terkait dengan pemberian dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMDes. Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Saat ini 80% desa di Jawa Timur sudah memiliki BUMDes. Dari 6.363 desa terdapat 1028 desa yang masuk klasifikasi maju. Apabila dikaitkan dengan BUMDes, kondisi klasifikasi BUMDes sebagian besar masih merupakan BUMDes pemula. Dalam sistem data desa *center* Provinsi Jawa Timur, kelemahan BUMDes di Jawa Timur terlihat pada satu indikator yaitu administrasi keuangan.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah bersedia sebagai lokasi pelaksanaan PMK dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola BUMDes adalah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan koordinasi pihak Politeknik Keuangan Negara STAN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Propinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pacitan, terdapat 12 BUMDes yang bersedia terlibat di dalam kegiatan ini yaitu Argomanik, Giri Arta, Bumi Kencono Pagerkidul, Makmur, Makmur Abadi, Manunggal, Kledung Sejahtera, Luwih Mukti, Sejahtera Punjung, Saroni Mulyo Sanggrahan, Arjuna Mulya Arjowinangun. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini adalah Direktur Utama dan Bendahara BUMDes.

Sebagai *civitas akademika*, Tim Politeknik Keuangan Negara STAN perlu berkontribusi di dalam meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes di bidang akuntansi dan keuangan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata Politeknik Keuangan Negara STAN selaku perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan negara untuk berkontribusi dalam mengelaborasi pengetahuan dan kemampuan kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BUMDes khususnya di Kabupaten Pacitan, yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di dalam mengambil keputusan keuangan.

METODE PELAKSANAAN

Metode PKM ini terdiri dari 2 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan tiap kegiatan, Tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN (Tim PKM) selalu berkoordinasi dengan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. Tahap perencanaan mencakup aktivitas



mengidentifikasi kapasitas setiap BUMDes di dalam melakukan pencatatan akuntansi, kunjungan satu BUMDes untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi dan menyusun bahan materi. Tahap perencanaan ini dilakukan selama bulan Mei 2022. Tahap kedua dilakukan dengan menyampaikan materi oleh Tim kepada pengurus BUMDes yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2022. Tahap ketiga berupa monitoring dan evaluasi atas pemahaman peserta terkait dengan materi yang telah disampaikan melalui aplikasi whatsapp dan visitasi. Visitasi dilakukan pada tanggal 21-24 November 2022.

PEMBAHASAN

Berdasarkan identifikasi awal, permasalahan yang dihadapi oleh 12 BUMDes yang mengikuti kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Identifikasi Kapasitas Kemampuan BUMDes

No.	BUMDes	Petugas Pembukuan	Pengurus mengikuti pelatihan	Latar belakang pendidikan	Penggunaan aplikasi
1.	Argomanik	Ada	Tidak	Tidak	Belum
2.	Luwih Mukti	Tidak	Tidak	Tidak	Belum
3.	Makmur	Ada	Tidak	Tidak	Belum
4.	Arjuna Mulya Arjowinangun	Ada	Tidak	Tidak	Belum
5.	Sarono Mulyo Sanggrahan	Ada	Tidak	Tidak	Belum
6.	Kencono Pagerkidul	Ada	Tidak	Tidak	Sudah
7.	Giri Arta	Ada	Pernah	Tidak	Belum
8.	Kledung Sejahtera	Ada	Tidak	Tidak	Belum
9.	Makmur Abadi	Ada	Tidak	Ada	Sudah
10.	Manunggal	Ada	Tidak	Ada	Belum
11.	Sejahtera Punjung	Ada	Tidak	Ada	Belum
12.	Sumber Makmur Abadi	Ada	Tidak	Tidak	Belum

Sumber: data diolah

Dari identifikasi awal ini, dapat dilihat bahwa hampir semua BUMDes telah didukung oleh tenaga pembukuan. Terdapat 11 BUMDes yang telah memiliki tenaga pembukuan, sedangkan satu BUMDes masih belum memiliki tenaga pembukuan. Namun, dari 11 BUMDes yang memiliki tenaga pembukuan, hampir semuanya belum pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hanya terdapat satu BUMDes yang personilnya mendapatkan pelatihan terkait dengan pembukuan atau akuntansi. Selanjutnya, dari sisi dukungan aplikasi, dapat dilihat bahwa hanya terdapat dua BUMDes yang telah didukung dengan aplikasi pelaporan keuangan, sedangkan sisanya belum didukung dengan aplikasi ini.

Dari pemetaan awal ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama BUMDes di Pacitan adalah (1) kompetensi pegawai terkait dengan akuntansi dan (2) dukungan aplikasi akuntansi.

Berdasarkan hasil pemetaan ini, Tim PKM melakukan visitasi kepada salah satu BUMDes untuk mendapatkan masukan lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Tim PKM melakukan kunjungan ke BUMDes Arjuna Mulya, yang berada di Desa Arjowinangun. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022. BUMDes Arjuna Mulya ini berdiri pada tahun 2021 dan dikategorikan sebagai BUMDes Rintisan (pemula) oleh Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. BUMDes ini belum memiliki tenaga pembukuan, belum pernah mengikutsertakan pegawainya ke dalam pelatihan terkait dengan pembukuan dan belum memiliki aplikasi yang membantu penyusunan laporan keuangan. Pertemuan dilaksanakan di ruang serba guna Desa Arjowinangun yang dihadiri oleh Direktur dan Bendahara BUMDes, Kepala Desa Arjowinangun dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Pacitan.

Gambar 1: Visitasi ke BUMDes Arjuna Mulya



Sumber: Dokumentasi

Saat ini, BUMDes Arjowinangun memiliki unit usaha penjualan gas dan internet desa. Usaha penjualan gas sudah berjalan dengan baik, namun pembukuan hanya dilakukan secara sederhana. Sesuai dengan hasil perencanaan, kesulitan dari BUMDes Arjowinangun adalah masih belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. BUMDes juga kesulitan untuk merekrut pegawai karena belum mampu memberikan remunerasi yang memadai untuk pegawainya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka Tim PKM mengidentifikasi permasalahan utama di BUMDes Kabupaten Pacitan adalah masih rendahnya kompetensi pengelola BUMDes terkait dengan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Tim PKM menilai bahwa materi yang disusun harus mencakup konsep dasar akuntansi, pencatatan transaksi sederhana dan penggunaan aplikasi sederhana berbasis excel yang sudah dikembangkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Adapun materi yang disampaikan meliputi (1) pengenalan aset dan utang, (2) pengenalan pendapatan dan beban, (3) pengidentifikasian laba, (4) pengenalan jenis-jenis laporan keuangan, (5) pengenalan manfaat laporan keuangan, dan (6) praktik penyusunan laporan keuangan. Pemaparan oleh Tim PKM dilakukan secara interaktif dengan peserta sehingga definisi-definisi yang diharapkan muncul dari diskusi interaktif bukan merupakan definisi baku di dalam akuntansi.

Tim PKM kemudian melakukan pemaparan dan diskusi materi pada tanggal 2 Juni 2022. Rincian materi yang disampaikan dan diskusi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, pengenalan aset dan utang. Konsep aset dan utang disajikan secara sederhana. Tim PKM menjelaskan bahwa aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan menjadi hak dari BUMDes, sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh BUMDes. Peserta diminta untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh BUMDes. Berdasarkan hasil diskusi antara Tim PKM dan peserta, BUMDes masih sulit membedakan antara aset desa dengan aset BUMDes, terutama untuk aset-aset pemerintah desa yang dikelola oleh BUMDes. Kedua, pengenalan pendapatan dan beban. Tim PKM mengenalkan konsep pendapatan sebagai hasil kegiatan BUMDes dan beban merupakan semua pengeluaran BUMDes untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Tim PKM juga menjelaskan bagaimana membedakan pengeluaran yang dibebankan



dengan pengeluaran yang dikapitalisasi ke aset BUMDes. Dari diskusi antara Tim PKM dan peserta, banyak permasalahan yang dihadapi BUMDes dalam membedakan pengeluaran yang dibebankan dan pengeluaran yang dikapitalisasi. Ketiga, pengidentifikasian laba. Tim PKM menjelaskan bahwa laba merupakan pendapatan dikurangi dengan beban. Selama pendapatan lebih besar dari pada beban, maka BUMDes mendapatkan laba sedangkan bila beban lebih besar dari pendapatan maka BUMDes akan mendapatkan kerugian.

Gambar 2: Pemaparan dan diskusi materi



Sumber: Dokumentasi

Keempat, pengenalan jenis-jenis laporan keuangan. Tim PKM menjelaskan bahwa BUMDes dapat memilih dua jenis standar, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Bagi BUMDes yang masih termasuk UMKM dapat menggunakan SAK EMKM, sedangkan bagi BUMDes yang sudah tidak tergolong EMKM, dapat menggunakan SAK ETAP. Perbedaan utama kedua SAK tersebut adalah jenis laporan. Bagi BUMDes yang menggunakan SAK ETAP, laporan keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Sementara itu, bagi BUMDes yang menggunakan SAK EMKM hanya perlu menyiapkan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Diskusi dilakukan dengan membahas standar apa yang lebih tepat digunakan oleh BUMDes. Dari hasil pembahasan, secara umum pengurus BUMDes menyimpulkan bahwa penggunaan SAK EMKM lebih baik meskipun dalam pembahasan didapatkan informasi bahwa terdapat BUMDes yang unit usahanya merupakan badan hukum sehingga tidak dapat menggunakan SAK ETAP maupun SAK EMKM. Kelima, pengenalan manfaat laporan keuangan. Tim PKM mengajak pengurus BUMDes untuk mengidentifikasi bagaimana mereka menilai apakah bisnis yang dijalankan saat ini menguntungkan, apakah harga yang mereka buat sudah tepat dan apakah BUMDes sudah tumbuh sesuai dengan harapan. Dalam sesi ini, pengurus BUMDes kesulitan untuk menentukan hal tersebut, terutama dalam menilai perkembangan BUMDes. Tim PKM kemudian menjelaskan manfaat dari laporan-laporan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan sedangkan laporan neraca merupakan laporan yang digunakan untuk melihat pertumbuhan dari BUMDes. Keenam, praktik menyusun laporan keuangan. Setelah peserta mengerti pentingnya laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan, Tim PKM kemudian membimbing pengurus BUMDes untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan BUMDes berbasis *excel* yang sudah dibuat oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Proses pendampingan dimulai dengan menyusun daftar akun dan bagaimana mengubahnya sesuai dengan kegiatan BUMDes. Setelah itu, kasus transaksi diberikan kepada peserta untuk dilakukan penjumlahan ke dalam sistem. Pada akhir praktik ini, tiap BUMDes diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan masing-masing berdasarkan kasus yang diberikan.



Tahapan berikutnya, pendampingan Tim PKM kepada pengurus BUMDes dilakukan secara daring. Media yang digunakan oleh Tim PKM dalam melakukan pendampingan menggunakan zoom dan aplikasi whatsapp. Selama jangka waktu tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi. Pertama, pengurus BUMDes masih sulit menentukan bagaimana suatu transaksi dicatat. Beberapa transaksi yang melibatkan banyak akun cenderung membingungkan pengurus. Sebagai contoh untuk transaksi sebagai agen BNI Link, setiap transaksi akan melibatkan kas, pengurangan saldo BNI Link, dan beban administrasi bank. Pengurus masih kesulitan untuk menentukan berapa yang diakui sebagai pendapatan, berapa beban pokok penjualan dan bagaimana perlakuan beban lain yang terjadi. Kedua, pengurus BUMDes masih belum memahami perlunya kebijakan akuntansi. Hal ini diketahui pada saat menentukan beban penyusutan aset tetap. Pertimbangan umur masa manfaat dan kebijakan nilai sisa masih belum dituangkan ke dalam kebijakan akuntansi. Selain itu, pengurus BUMDes juga belum menyadari perlunya pernyataan mengenai standar akuntansi yang digunakan di dalam menyusun laporan keuangan. Ketiga, terdapat BUMDes yang memerlukan laporan arus kas sebagai upaya penjelasan perbedaan antara nilai laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan kas yang tersedia. Atas permasalahan tersebut, Tim PKM melakukan diskusi dan membantu untuk memperbaiki laporan keuangan yang telah disusun oleh beberapa BUMDes.

Tahap akhir yang dilakukan oleh Tim PKM dalam kegiatan ini adalah evaluasi dengan melakukan kunjungan ke beberapa BUMDes untuk mengidentifikasi kendala yang masih mereka hadapi. Tim PKM melakukan kunjungan ke tiga BUMDes, yaitu BUMDes Sumber Makmur Abadi di desa Sumberejo, BUMDes Rejo Mulyo desa Sidomulyo dan BUMDes Sumber Maju desa Sumberharjo. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi ketiga BUMDes telah teridentifikasi oleh Tim PKM. BUMDes Sumber Makmur Abadi sudah mampu menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan berbasis *excel* dari Politeknik Keuangan Negara STAN, namun saat ini mereka sudah mulai melakukan desentralisasi pencatatan ke unit bisnis mengingat kegiatan yang sudah mulai banyak. Untuk itu, suatu aplikasi yang mampu menggabungkan semua laporan keuangan unit usaha diperlukan. BUMDes Rejo Mulyo masih mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan. Saat ini pengurus baru mencoba menyusun laporan keuangan tahun 2018 karena BUMDes belum pernah menyusun laporan keuangan sejak berdirinya. Saat Tim PKM mereviu laporan tahunan 2018 yang telah dibuat, Tim PKM menemukan banyaknya kesalahan jurnal yang dibuat sehingga perlu dikoreksi. BUMDes Sumber Maju mengalami permasalahan dalam mencatat transaksi-transaksi baru sehingga perlu melakukan penyesuaian dalam bagan akun. Namun demikian, penyesuaian bagan akun masih mengalami masalah.

Dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut, solusi yang ditawarkan oleh Tim PKM. Pertama, terkait dengan kendala di BUMDes Sumber Makmur Abadi, sampai dengan aplikasi yang dapat menggabungkan pencatatan pada unit usaha, untuk sementara waktu dalam melakukan pembukuan manual di unit usaha untuk kemudian dicatatkan ke dalam sistem oleh petugas di BUMDes. Kedua, BUMDes Rejo Mulyo perlu meningkatkan kapasitas petugas pembukuan. Laporan keuangan tahun 2018 telah berhasil dibuat secara bersama-sama dengan Tim PKM, namun untuk laporan keuangan tahun berikutnya perlu untuk dilakukan secara mandiri dan berkomunikasi dengan Tim PKM bila terdapat kendala. Ketiga, untuk permasalahan di BUMDes Sumber Maju, Tim PKM memberikan panduan dan mempersilahkan petugas pembukuan untuk melakukan pencatatan secara mandiri. Apabila menemukan kendala, Tim PKM mengharapkan petugas pembukuan untuk dapat menghubungi Tim PKM.

Selama pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu enam bulan, Tim PKM juga mengidentifikasi bahwa kompetensi dari pengelola BUMDes tidak hanya memiliki dampak terhadap proses penyusunan laporan keuangan namun juga ke dalam aspek pelaksanaan dan pengembangan bisnis BUMDes. Dalam aspek pelaksanaan bisnis, kami mengidentifikasi



bahwa kurangnya pengetahuan terkait keuangan dan hukum bisnis membuat lemahnya kapasitas BUMDes dalam mengidentifikasi apakah suatu aset merupakan aset BUMDes atau aset desa. Selain itu, kontrak bisnis yang dilakukan BUMDes masih belum disusun dengan baik sehingga banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bisnis dan tidak tercakup di dalam kontrak. Dalam aspek pengembangan bisnis, kompetensi yang dimiliki oleh pengurus membatasi cakupan analisis kelayakan suatu bisnis. Meskipun Tim PKM melihat bahwa beberapa BUMDes sudah memiliki rencana pengembangan bisnis, namun mereka terkendala dalam mengidentifikasi luaran dari setiap skema bisnis yang telah disusun, sehingga manfaat dari setiap pengembangan bisnis tidak teridentifikasi dengan baik. Oleh karena itu, pendampingan yang terintegrasi terkait dengan pengembangan bisnis perlu untuk dilakukan di BUMDes Kabupaten Pacitan.

PENUTUP

Kegiatan PKM ini dilakukan selama enam bulan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berdasarkan kegiatan ini, Tim PKM mampu menarik beberapa kesimpulan. BUMDes mengalami kesulitan di dalam menyiapkan laporan keuangannya. Kendala ini disebabkan oleh tidak adanya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan aplikasi penyusunan laporan keuangan. Tim PKM Politeknik Keuangan Negara STAN melakukan PKM dengan tujuan untuk berperan serta dalam meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes di bidang akuntansi. Selain itu, pendampingan dilakukan dengan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis *excel* dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam tahapan pelaksanaan, Tim PKM melakukan pelatihan terkait dengan pemahaman atas laporan keuangan dan penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis *excel*. Dalam masa pendampingan selama enam bulan, Tim PKM mengidentifikasi bahwa petugas pembukuan BUMDes masih kesulitan di dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi baru yang terjadi setelah pelatihan. Dalam tahap evaluasi, Tim PKM memberikan pendampingan pencatatan transaksi kepada BUMDes yang masih kesulitan di dalam memahaminya. Dalam tahap evaluasi, Tim PKM juga mengidentifikasi kebutuhan aplikasi yang mampu menggabungkan laporan keuangan unit bisnis bagi BUMDes yang melakukan desentralisasi proses pencatatan di unit-unit usahanya. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi yang ada saat ini perlu dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut.

Selain mengidentifikasi permasalahan terkait penyusunan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Pacitan, Tim PKM juga mengidentifikasi adanya kelemahan kompetensi pengurus BUMDes di dalam pelaksanaan dan pengembangan bisnis. Kompetensi terkait dengan keuangan dan hukum bisnis perlu juga dimiliki oleh pengurus BUMDes. Sehingga pendampingan yang lebih terintegrasi akan membantu BUMDes untuk dapat berkembang di dalam mendukung perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha miliki desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Arista, D., Ayu Satyanovi, V., Dwi Ayu Rahmawati, L., & Asri Hapsari, A. (2021). Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Bumdes Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 550. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.35657>
- Biduri, S., Hariyanto, W., & Meiliza, D. R. (2022). Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi pada Bumdes “Sumber Rejeki” Desa Durung Bedug Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(6), 650–655.



<https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v4i6.6329>

- CNN Indonesia. (2019). BPK: BUMDes belum berkontribusi penuh pada ekonomi desa. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa>
- Fauzan, S., Wilda, M., Fahmisyah, W., & Cahyani, W. R. (2022). Pendampingan penyusunan laporan keuangan Bumdes Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 3(2), 98–105. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i2.3027>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. E. (2019). Edukasi akuntansi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Wikrama Parahita : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan usaha mikro kecil dan menengah pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 1–7. https://www.researchgate.net/publication/337917783_Edukasi_dan_Pendampingan_Pelaksanaan_Kewajiban_Perpajakan_Usaha_Mikro_Kecil_dan_Menengah_pada_UMKM_XYZ
- Fitriyah, N., Bambang, B., Mariadi, Y., & Nurabiah, N. (2022). Pendampingan pengelolaan keuangan BUMdes menggunakan telepon pintar. *E-Amal*, 2(2), 1073–1080. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/1534>
- Junaidi, J. (2020). Pendampingan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada badan usaha milik desa (Bumdes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286>
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2022). Pendampingan pelaporan keuangan BUMDes berbasis web. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(6), 268–277. <https://cers.ejournal.unri.ac.id/index.php/cers/article/view/77>